

# PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS TERHADAP PENGELOLAAN KETAHANAN HAYATI

by: Eka Martiningsih<sup>1</sup>

*This paper aims to identify and discuss the role of Balinese women in collective activities for community empowerment in two villages in Bali. The two sites are Legian (Site A) and Peninjooan (Site B). Information was collected using questionnaires and interviews with female leaders and other women in the two villages.*

*There are high levels of participation in community activities by women in both villages. Women are actively involved in social, cultural, spiritual, tourism and agricultural activities. However the capacities of women involved in community empowerment at Site A are higher than those at Site B. This is demonstrated by the success of the PKK (program for women to improve family welfare) at Site A, where the women have independently implemented a collective program for the eradication of mosquitoes carrying dengue fever. This activity involves the ongoing clearing of laneways as an activity from the women, by the women, for the women. At Site B, participation of women in collective activities is still low. There continues to be failure in leadership in various women's activities, which are only implemented if they are pushed directly by the government. The women of the community depend on direction from traditional male leadership for implementation of village activities.*

*Female leadership exists in the organizational structure known as the PKK (Family Welfare and Empowerment). This organization usually sits below, or shadows, male leadership at the 'lurah' (village) or 'banjar' (hamlet) level. The wives of the Lurah and Banjar are automatically appointed as leaders of the respective levels of PKK. At Sites A and B decisions made by the PKK are still dependent on agreement from the lurah or banjar head. Women have potential in various aspects of social capital, but unfortunately this is often overlooked as women are subordinate to men within the community. This is apparent in various leadership structures such as BAMUS (Badan Musyawarah), the institution which coordinates between community administrative and traditional leaders at Site A and BPD (Village Representation Agency) at Site B. Women are not represented in either of these organizations. Women in these locations need to be encouraged and empowered to strengthen women's organizations and increase women's involvement in decision-making.*

**Keywords:** Peranan Perempuan, Kelembagaan, Desa Adat

---

<sup>1</sup> Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Indonesia

## Pendahuluan

Terdapat bukti bahwa perempuan adalah perantara langsung dalam perubahan sosial dalam kesatuan keluarga di sebuah komunitas. Perempuan juga terlibat secara aktif di bidang sosial, budaya, spiritual, pertanian dan pariwisata. Tambahan pula, terdapat banyak dokumentasi dari kesuksesan perempuan dalam mengelola sumber daya alam (Nakatani, 1997; Walhi, 2007). Di Bali, peran perempuan hampir di semua bidang tidak terbantahkan. Sebagian besar kegiatan baik di bidang sosial, budaya, spiritual, pertanian dan rumah tangga perempuan pasti terlibat di dalamnya. Suryani (2006) menyatakan bahwa perempuan diharuskan untuk sadar tentang fakta-fakta yang ada seperti mereka adalah figur yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Hasil penelitian Meizen-Dick and Zwarteveen (2003) bahwa perempuan mempunyai waktu luang yang cukup banyak untuk digunakan dalam berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan sosial dan dalam membangun jejaring. Perempuan selalu mempunyai waktu untuk saling bertemu dan berhubungan dengan komunitasnya (Maluccio *et al.* 2003). Akan tetapi kajian tentang bagaimana perempuan memanfaatkan keunggulan modal sosial untuk lebih memberdayakan kemampuan dalam memahami masalah bersama dan mengatasi masalah bersama masih sangat kurang, apalagi kajian tentang posisi perempuan dalam struktur kelembagaan khususnya di tingkat desa sampai banjar dalam posisi pengambilan keputusan. Sesuai dengan pendapat Pietra (2006) bahwa modal sosial merupakan salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk mendorong komunitas agar saling mengisi dan memahami persoalan bersama untuk dapat mengembangkan kepentingan komunitas dan meningkatkan kesadaran komunitas serta menanggulangi masalah bersama. Oleh sebab itu kekuatan modal sosial yang dimiliki perempuan harus digali dan diekstra-

polasi untuk lebih memberdayakan perempuan.

Flora (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah harus dilaksanakan dengan terus menerus, apalagi dengan adanya globalisasi yang telah membawa perkembangan yang sangat pesat dalam perpindahan atau pertukaran barang, jasa, uang dan juga masyarakat, di mana fenomena ini juga akan menyebabkan terjadinya perpindahan hama dan penyakit tanaman, hewan dan bahkan manusia. Kalau hal ini tidak diatasi secara serius maka dapat mengancam pengadaan bahan pangan dan kemungkinan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketidakseimbangan alam. Untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap permasalahannya adalah dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya sosial yang berkembang dari orang atau kelompok orang yang memiliki hubungan yang saling menguatkan. Prinsip-prinsip di atas sebenarnya sudah cukup dikenal di masyarakat termasuk di Bali yaitu sistem subak (sistem pengairan di Bali), sistem adat (suka-duka) yang semuanya menggambarkan kesederajatan (Pietra, 2006). Tulisan ini ingin mengidentifikasi dan mengekstrapolasi partisipasi dan peran perempuan dalam masyarakat, sehingga untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai modal untuk pemberdayaan komunitas dalam rangka pengelolaan ketahanan hayati.

## Tinjauan Pustaka

### • Perkembangan Definisi Modal Sosial

Ahli ekonomi, sosiologi dan politik mendefinisikan modal sosial secara berbeda-beda. Secara umum, konsep modal sosial dikembangkan oleh dua aliran utama yaitu sosiolog-anthropologi, politik dan ekonomi kelembagaan (Vipriyanthi, 2007). Coleman (1990) berpendapat bahwa modal sosial ada-



lah atribut struktur sosial di mana seseorang ada di dalamnya. Modal sosial melekat dalam struktur sosial dan memiliki karakteristik *public good* namun setara dengan *financial capital*, *physical capital*, dan *human capital*. Lebih lanjut dinyatakan oleh Adler dan Woo Kwon (1999) bahwa karena modal sosial adalah barang publik (*public good*), sehingga tidak dimiliki oleh orang tertentu tetapi tergantung dari seluruh anggota dalam suatu jaringan kerja. Sifat *public good* tersebut menyebabkan setiap individu cenderung melalaikan kewajiban dalam memelihara keberlangsungannya dan sebaliknya mempercayakan pada anggota yang lain untuk jaminan pemeliharannya.

Dengan pengetahuan dan pemahaman mereka (modal masyarakat) diarahkan agar dapat menentukan tindakan untuk mengatasi permasalahan mereka. Kerangka modal masyarakat memungkinkan adanya penggunaan sumber daya setempat (lokal) dan memadukannya dengan sumber daya dari luar untuk membangun perekonomian yang vital, keterlibatan sosial dan suasana yang sehat (konduusif). Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap permasalahannya adalah dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya sosial yang berkembang dari orang atau kelompok orang yang memiliki hubungan saling menguatkan. Prinsip-prinsip di atas sebenarnya sudah cukup dikenal di masyarakat misalnya seperti budaya gotong royong, *tepo saliro* (empati), sistem subak (sistem pengairan di Bali), *pela gandong* (di Ambon), *jagong* (di Jawa Timur), sistem adat (suka-duka) di Bali yang semuanya menggambarkan kesederajatan. Dari fenomena tersebut maka dengan tegas kita bisa katakan bahwa masyarakat Indonesia dan juga Bali sudah memiliki modal sosial (Pietra, 2006). Secara sosiologis masyarakat kita dikenal dengan masyarakat timur dengan kemampuan norma-norma sosial yang cukup besar. Dalam kondisi seperti ini, maka dengan memanfaatkan modal masyarakat, adanya pergerakan masyarakat ke arah

tatanan yang baru di mana masyarakat pola tradisional bergerak ke arah masyarakat moderen dapat dikembangkan guna mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Definisi yang lebih spesifik mengenai modal sosial dinyatakan oleh Bank Dunia (1998) yang menyatakan modal sosial adalah norma-norma dan hubungan sosial yang melekat dalam struktur sosial masyarakat dan memungkinkan orang-orang untuk mengkoordinasikan kegiatan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan pendapat ini, Woolcock dan Narayan (2000) menyatakan bahwa modal sosial merupakan norma dan jaringan kerja yang memungkinkan orang melakukan sesuatu secara bersama-sama. Lebih lanjut dinyatakan bahwa jaringan kerja komunitas dan masyarakat merupakan hasil dari keadaan politik, hukum dan kelembagaan, sehingga pembangunan akan tercapai bila terdapat forum bersama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, yang secara bersama mampu mengidentifikasi dan mencapai tujuan bersama. Modal sosial dalam hal ini digunakan sebagai penghubung.

Modal sosial dapat mendorong kekuatan kelompok, komunitas, adat, desa maupun negara dan bangsa, memiliki lima pilar yang membangun sudut segilima yang menggambarkan menopang sebuah bangunan yaitu pemberdayaan masyarakat menuju sejahtera berkelanjutan (*sustainable livelihoods*). Masing-masing sudut ditanam dengan kekuatan pilar yang sama. Adapun pilar-pilar tersebut adalah: modal fisik (*physical capital*), modal uang (*financial capital*), sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya alam (*natural capital*) dan modal sosial (*social capital*). Ke lima pilar tersebut harus dalam posisi seimbang satu dengan yang lainnya supaya terjadi kehidupan masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable livelihoods*) (Pietra, 2006). Sementara Flora (2007) membagi modal sosial menjadi tujuh aset yaitu aset fisik, aset keuangan,

aset budaya, aset politik, aset manusia, aset sosial dan aset alam. Lebih lanjut dinyatakan bahwa modal sumber daya manusia meliputi keterampilan dan kemampuan orang-orang untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya mereka, dan bagaimana mereka dapat mengakses sumber daya dan kesatuan pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman mereka, mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan, dan akses untuk meningkatkan modal masyarakat. Dinyatakan juga bahwa sering laki-laki dan perempuan mempelajari aspek berbeda dari lingkungan mereka. Aspek yang berbeda dari modal sumber daya manusia merupakan hal penting untuk dihormati (Flora dan Kroma, 1998).

Flora (2007) juga menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah harus dilaksanakan dengan terus menerus apalagi dengan adanya globalisasi yang telah membawa perkembangan sangat pesat dalam perpindahan atau pertukaran barang, jasa, uang dan juga masyarakat. Fenomena ini juga akan menyebabkan terjadinya perpindahan hama dan penyakit tanaman, hewan dan bahkan manusia. Kalau hal ini tidak diatasi secara serius maka akan dapat mengancam pengadaan bahan pangan dan bahkan kemungkinan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketidakseimbangan alam. Falk (2007) menyatakan bahwa bila kita menengok ke belakang kejadian-kejadian global yang terjadi seperti pemanasan global, maka dapat dilihat dampaknya bagi manusia, yaitu berpengaruh terhadap ketersediaan air dan secara paralel pada penyediaan pangan bagi penduduk. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kepedulian dan pemahaman yang mendalam dari masyarakat baik pada tingkat pimpinan maupun masyarakat (komunitas). Lebih lanjut ditambahkan oleh Flora (2007) bahwa untuk memberdayakan masyarakat maka pendekatan yang terbaik dilakukan adalah pendekatan *local genius* di mana identifikasi masalah dan pemecahannya harus disesuaikan

kan dengan keadaan masyarakat setempat.

### Peranan Perempuan Bali

Pada dasarnya perempuan (khususnya perempuan Bali beragama Hindu) telah memiliki peran khusus dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, kehidupan spiritual atau beragama, dan perannya dalam kehidupan sosial di masyarakat, serta dalam bidang pertanian (Pendit, 2002). Lebih lanjut dinyatakan oleh Suryani (2006) bahwa dalam peran-peran tersebut komunitas perempuan telah merasa mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan norma dan aturan di masyarakat. Misalnya seperti pada pelaksanaan peran dalam keluarga, perempuan memiliki peran memelihara keluarga (suami, anak, mertua) dan semua yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Perempuan Bali (Hindu) pun dalam kesehariannya telah memiliki budaya yang membagi (menempatkan) sesuatu pada tempat-tempat tertentu seperti: peralatan dapur tidak boleh dicampur pemakaiannya dengan peralatan cuci atau untuk aktivitas lainnya. Peralatan makan menempati tempat tertentu dan tidak dicampur pemakaiannya dengan peralatan lainnya (apalagi peralatan untuk sembahyang). Pada pembagian ruangan pun demikian, misalnya ruang tamu, dapur, ruang cuci, ruang tidur menempati tempat-tempat tertentu. Kalau hal ini dikaitkan dengan pemeliharaan kesehatan maka semua aktivitas tersebut secara eksplisit merupakan salah satu tindakan pelestarian sumber daya alam. Pada pelaksanaan peran pribadi, beberapa perempuan memiliki tugas dalam ranah publik seperti karier dan jaringan pertemanan (Indrayoga, 2006).

Penyadaran kepada perempuan Bali agar mempunyai wawasan yang luas akan lebih meningkatkan kemampuan orang Bali secara keseluruhan baik dalam menjaga identitas budaya maupun dalam memberdayakan komunitas (Suryani, 2006). Demikian



pula dalam hal karier, perempuan Bali hanya mencapai tingkat menengah ke bawah, hanya sebagian kecil saja yang mampu mengambil kedudukan di tingkat eksekutif (pengambil keputusan).

Pada pelaksanaan peran spiritual, komunitas perempuan telah memiliki pembagian peran yang berkaitan dengan pembuatan upakara dan melaksanakan upakara, dan biasanya pada kegiatan tertentu telah terjadi kerjasama antara komunitas perempuan dan pria. Ada beberapa hal yang perlu dicermati bahwa dalam peran spiritual, secara tidak langsung perempuan telah melaksanakan beberapa tindakan pelestarian sumber daya alam (perayaan *tumpek uduh* untuk tanaman, *tumpek uye* untuk hewan, dan *tumpek landep* untuk peralatan) (Sudarsana, 2005).

Indrayoga (2006) menyatakan bahwa masalah yang paling krusial dari perempuan adalah persoalan bagaimana mengangkat peran perempuan? Lebih lanjut dikatakan bahwa persoalan ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki hanya masalah pemikiran, yaitu paling tidak laki-laki berpikir bahwa perempuan satu tingkat di bawah laki-laki. Pikiran-pikiran itu sebenarnya dari dulu sudah ada dan akhirnya perempuan pun merasa bahwa dirinya adalah memang manusia kelas dua. Bagaimana sebenarnya kita berupaya menghilangkan pikiran tersebut sehingga kita bisa berpikir sebenarnya perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Sesungguhnya ajaran agama Hindu telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi terciptanya kesetaraan gender antara perempuan dan pria. Garansi kesetaraan yang mematahkan predikat stereotip bahwa perempuan itu manusia kelas dua tersurat dalam ajaran Weda (kitab Suci agama Hindu), meskipun masih berupa dasar-dasar ajaran etika (Pendit, 2002). Menurut salah seorang pemerhati masalah perempuan Sudarsana (2006) bahwa ajaran etikalah yang mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat Hindu, sehingga tercipta gerak kehidupan yang harmo-

nis dan selaras di dalam kegiatan bermasyarakat. Jika merujuk kitab suci Weda, tak ada yang namanya gender dominan dan subdominan. Lebih lanjut dikatakan bahwa wacana tentang kesetaraan gender makin lantang diteriakkan hampir di seluruh dunia. Tuntutan ini sangat manusiawi bahkan mulia, karena melalui tuntutan tersebut kaum perempuan sudah berani bersuara lantang dan tergerak hatinya untuk mengetahui jatidiriya serta mengetahui secara jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban seorang perempuan. Tuntutan kesetaraan gender dianggap sebuah kritik dan rem bagi pria supaya tidak memperlakukan perempuan semau gue. Prinsip kesetaraan dan keharmonisan antara kaum perempuan dan pria harus dilandasi dengan suara hati nurani yang berbudi luhur sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam agama Hindu juga dikenal ajaran swadharma, yang memandang kehidupan makhluk di alam semesta ini dapat mencerminkan aktivitas yang dinamis, seimbang, selaras, dan serasi. Kalau swadharma ini diubah oleh manusia sendiri, hanya atas dasar kemajuan zaman dan teknologi, itu sama dengan mengubah kesadaran, keseimbangan dan keserasian alam terhadap isinya. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan atau disharmoni dan akan berdampak negatif terhadap akhlak, moral, budi dan perilaku manusia sehingga kehancuran tidak terhindarkan.

Ardhana (1994) menyatakan bahwa ada dua masalah besar yang sedang mengepung Bali yaitu sumber daya manusia (*human capital*) dan masalah sumber daya alam (*natural capital*). Dua hal yang menurut Pietra (2007) merupakan pilar dari modal sosial yang akan menjamin terwujudnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju *sustainable livelihoods*. Lebih lanjut dikatakan bahwa apabila manusia khususnya manusia Bali sudah tidak memiliki sistem nilai dan sistem sosial yang merupakan implementasi dari hubungan antar manusia dengan manusia,

manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya, maka budaya Bali bisa musnah. Rasa saling memiliki, budaya-budaya yang merupakan pendukung pemberdayaan masyarakat akan memudar. Hal ini didukung juga oleh Suryani (2006) bahwa harmoni kehidupan harus tetap terjaga, sehingga yang ada bukan kehidupan untuk bekerja tetapi juga hidup untuk membina hubungan baik dengan orang lain.

Pietra (2007) membahas beberapa fenomena yang terjadi di lingkup desa, yang menyebabkan desa tidak dianggap sebagai sebuah kekuatan unik yang mampu berkembang dan membangun diri sendiri untuk menguatkan negara dan bangsa, dan berkembangnya budaya lokal di desa dianggap tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi pada kenyataannya untuk menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi maka kekuatan masyarakat lokal dalam hal ini desa yang akan berperan. Berangkat dari hal di atas maka desa pada dasarnya memiliki modal sosial dan diharapkan kekuatan sosial kapital tersebut dalam ranah *community development* dapat mendorong kualitas hidup masyarakat desa. Kurangnya pemahaman semua pihak terhadap modal sosial, jejaring kerja dan kepemimpinan lokal berpotensi menimbulkan efek kontradiktif bagi keserasian hubungan komunitas dengan lingkungannya. Tanpa modal sosial, kohesi dalam komunitas berkurang sehingga tidak dapat mengorganisasi diri dalam pemeliharaan mutu kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihoods*) (Beeton, 2006). Indikasi ke arah ini sebenarnya telah nampak yaitu dengan semakin meningkatnya kejahatan dan kasus-kasus sosial di masyarakat terutama kasus-kasus adat khususnya untuk di Bali dan terjadinya penurunan kohesi keluarga dan partisipasi masyarakat (Grootaert, 1998). Kasus-kasus kekerasan (baik fisik maupun verbal) terhadap perempuan semakin meningkat, yang semakin menunjukkan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan pertemanan makin memudar. Narayan (2000),

Daasgupta and Serageldin (2000) and Flora (2007) menyatakan bahwa modal sosial berupa *bonding* mengacu pada ikatan yang dekat dan membangun kohesi masyarakat. Ikatan ini merupakan ikatan kohesif di dalam kelompok sosial yang relatif homogen (misalnya dalam keluarga etnik); *bridging* merupakan modal sosial yang ikatannya lemah yang dapat menjadi jembatan dari masing-masing organisasi dan komunitas, terjadi di antara teman, asosiasi atau kolega (misalnya gerakan hak azasi, seminar oleh ikatan profesi); ditambahkan oleh (Putnam, 2000; Hanson *et al.*, 2006) modal sosial *linking* merupakan hubungan vertikal, berupa *bridging* antara kelompok dengan status sosial, kesejahteraan dan kekuatan yang berbeda. Komunitas yang ideal akan terwujud apabila ketiga bentuk modal sosial tersebut terdapat dalam keseimbangan (ABS, 2002).

Banyak juga perempuan berperan aktif di bidang pertanian terutama pada kegiatan-kegiatan pertanian yang memerlukan ketekunan dan ketelitian seperti; pembibitan, panen. Di Ndop, Kamerun di mana perempuan di negara ini juga lebih banyak terlibat dalam kegiatan pertanian yang kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga (Fonjong and Athanasia, 2007). Lebih lanjut dinyatakan bahwa peranan perempuan dalam bidang pertanian di negara ini lebih banyak dibandingkan pihak prianya, dan bahkan pendapatan perempuan dari kegiatan bertani lebih banyak berpengaruh pada pendapatan rumah tangga.

Ada contoh menarik dari keberhasilan perempuan dalam pemberdayaan komunitasnya pada pengendalian hama terpadu. Ada dua orang perempuan, Romini (anggota aktif sekolah lapangan Pengendalian Hama Terpadu atau SLPHT), sedangkan Sunani (bukan anggota SLPHT). Romini, 45 tahun dengan 4 orang anak dan mengusahakan sawah untuk kehidupan sehari-hari. Suami Romini adalah penarik becak yang hampir setiap hari menarik becak di luar rumah sehingga



pekerjaan di sawah hampir semuanya dikerjakan oleh Romini. Dari pengalamannya bertani sejak kecil maka Romini tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan semua kegiatannya di sawah apalagi penghasilan suami Romini tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Dengan kondisi yang demikian maka Romini berusaha menemukan cara agar sawahnya yang hanya seluas 750 m<sup>2</sup> dapat ditingkatkan hasilnya. Akhirnya dengan mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu dari tahun 1995-1996, maka pengetahuan Romini akan bercocok tanam yang baik dan ramah lingkungan membuahkan hasil. Dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimiawi, dan mulai menggunakan pupuk organik dan melakukan pengendalian hama secara biologi maka hasil yang diperoleh dari sawahnya meningkat hampir 100%.

Sekarang setelah keberhasilannya tersebut maka Romini selalu berusaha menemui komunitas perempuan di sekitarnya dan mulai menyebarkan prinsip-prinsip PHT dan menyarankan agar tidak menggunakan pestisida lagi, karena selain meningkatkan biaya produksi pestisida juga berbahaya bagi keseimbangan alam serta berbahaya bagi kesehatan. Dewasa ini petani di sekitar Romini sudah tidak menggunakan pestisida dan pupuk anorganik lagi.

Lain lagi cerita Sunani yang tidak pernah belajar di sekolah lapangan PHT, tetapi mempelajari teknik bercocok-tanam yang ramah lingkungan dari saudara dan tetangganya yang lebih dahulu melaksanakannya. Dari contoh di atas maka SLPHT merupakan salah satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas atau kemampuan perempuan dalam komunitas. Di samping itu SLPHT juga merupakan kegiatan yang diharapkan mampu untuk pengembangan kehidupan yang berkelanjutan yang meliputi pemberdayaan petani, mempertahankan keanekaragaman hayati, ke-

tahanan pangan, pembelajaran komunitas dan salah satu usaha untuk menjaga kesehatan.

## Metodologi

Penelitian dilaksanakan di dua desa yaitu desa Legian (site A), Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Desa kedua adalah desa Peninjoan (site B), Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Site A mewakili komunitas desa pariwisata (sebagian besar masyarakatnya berbisnis terutama di bidang pariwisata), sedangkan site B mewakili komunitas desa pertanian (sebagian besar masyarakatnya bertani).

Wawancara dilaksanakan terhadap perempuan dari elemen PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan remaja perempuan dari elemen Sekeha Teruna Teruni. Informasi dikumpulkan selama empat bulan, mulai April sampai Juni 2007. Aspek yang ditanyakan antara lain mencakup struktur kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemberdayaan kelompok perempuan, partisipasi komunitas dalam kegiatan bersama, komunikasi dan tingkat hubungan dengan keluarga dan orang lain.

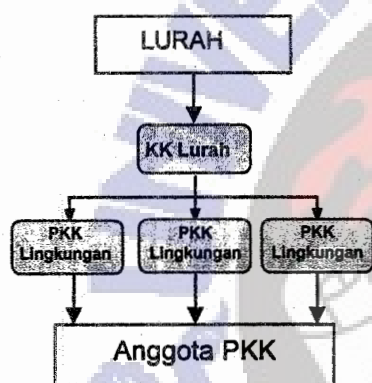
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Creswell, 1998) untuk mengidentifikasi dan mengekstrapolasi peran perempuan dengan menggunakan teknik wawancara semi struktur (Fontana, 2002), dan data dikaji berdasarkan analisis percakapan (Silverman, 1998). Jumlah responden yang diwawancarai secara keseluruhan adalah 28 responden, yang terdiri dari 18 orang dari site A dan 10 orang dari site B.

Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan tiga orang responden dari kedua desa yang dipilih secara random untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang peranan perempuan dalam kegiatan-kegiatan kolektif dan partisipasi dalam pemberdayaan kelompok di kedua desa tersebut.

## Hasil

### • Kepemimpinan Perempuan

Secara organisasi pada tingkat kepemimpinan pemerintahan (desa Dinas) baik di Kelurahan Legian maupun desa Peninjoan komunitas perempuan telah memiliki wadah tersendiri yaitu organisasi PKK. Organisasi PKK ini terdapat dari tingkat Kelurahan (desa Dinas) sampai di tingkat Banjar (lingkungan) dan merupakan organisasi yang terletak di bawah kepemimpinan Kepala Desa untuk PKK tingkat Desa dan berada di bawah Kelian Banjar untuk PKK tingkat Banjar (Gambar 1).



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi PKK di Tingkat Kelurahan**

Ketua PKK tingkat kelurahan biasanya otomatis adalah istri dari Lurah, demikian juga halnya dengan Ketua PKK tingkat Banjar adalah istri dari Kelian Banjar. Di ke dua desa tempat penelitian struktur organisasi PKK terdiri dari Ketua PKK, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang biasanya membidangi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai program PKK. Program PKK disebut Dasa Wisma yaitu: (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila, (2) Gotong royong, (3) Pangan, (4) Sandang, (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga, (6) Pendidikan keterampilan, (7) Kesehatan, (8) mengembangkan kehidupan berkoperasi, (9) Kelestarian lingkungan hidup, dan (10) Perencanaan sehat.

Secara kelembagaan organisasi PKK ini memiliki agenda tersendiri walaupun dalam beberapa kegiatan sering melakukan koordinasi dan pembagian tugas dengan kepala desa. Agenda PKK yang bersifat independen, dilaksanakan secara rutin setiap bulan seperti rapat, kegiatan posyandu, arisan. Akan tetapi kalau suatu kegiatan melibatkan komunitas dinas dan adat maka kelompok PKK harus berkoordinasi dengan pimpinan komunitas pria.

Pada tingkat Desa Adat (kepemimpinan komunitas), baik site A maupun site B juga terdapat organisasi informal komunitas perempuan yang dipimpin seorang perempuan yang disebut "Krama Istri". Sama seperti pada tingkat desa Dinas (kepemimpinan pemerintahan), pemimpin perempuan ini biasanya otomatis adalah istri dari kelian adat. Krama istri lebih banyak berperan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan dan budaya, seperti pada saat upacara keagamaan di pura setempat (misalnya Kahyangan Tiga) dan juga jika ada kematian warga.

Di site A ada struktur lembaga kemasyarakatan yang bertindak sebagai penghubung antara desa dinas dan desa adat yang dikenal dengan nama BAMUS. Yang menarik dari struktur kepemimpinan dalam BAMUS ini adalah tidak ada elemen pemimpin dari komunitas perempuan. Hal ini tersirat pada wawancara mendalam dengan salah seorang responden dari PKK di site A bahwa:

sebenarnya perlu menempatkan elemen perempuan di masing-masing struktur kepemimpinan termasuk BAMUS, karena pada kenyataannya pada setiap kegiatan, perempuan akan selalu terlibat dan bahkan sering ada pada posisi-posisi penting. Karena elemen perempuan tidak terwakili di BAMUS yang merupakan koordinasi dari seluruh kegiatan baik dinas maupun adat, maka sering terjadi beberapa kesalahanpahaman yang membuat perempuan mengalah (mengorbankan kepentingan).



Dari kenyataan ini dikhawatirkan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan perempuan tidak dapat diakomodasikan. Struktur kelembagaan seperti BAMUS ini tidak ada di site B.

Di site B kepemimpinan adat terlihat lebih berpengaruh dibandingkan kepemimpinan dinas. Di site A maupun site B peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih kurang, karena struktur kelembagaan dari organisasi perempuan yang mengharuskan keputusan harus dilakukan oleh kelembagaan yang dipimpin pria (kelompok perempuan harus selalu berkoordinasi dengan kelompok pria) tetapi tidak demikian sebaliknya.

#### • Partisipasi Perempuan

Di site A masyarakatnya sangat heterogen, karena hampir lebih dari setengah masyarakatnya berasal dari luar desa. Sebagian besar memiliki mata pencaharian di bidang pariwisata, sehingga mobilitas masyarakat di site A sangat tinggi. Di site ini sudah mulai terbentuk kelompok-kelompok ekonomi produktif tetapi masih sangat disayangkan bahwa kelompok-kelompok tersebut belum terorganisasi dengan baik. Kelompok-kelompok tersebut terbentuk karena persamaan kepentingan dan lokasi, misalnya seperti kelompok dagang canang, kelompok perempuan pemijat di pinggir pantai, kelompok pedagang kerajinan dan lainnya. Menurut seorang informan kadang-kadang kelompok-kelompok tersebut dibentuk hanya karena ada kemudahan untuk meminjam kredit di bank. Di samping kelompok ekonomi produktif, kelompok yang terbentuk karena persamaan hobi juga sudah mulai terbentuk seperti kelompok olahraga dan kelompok kesenian. Yang menarik di site A adalah adanya kesadaran seluruh masyarakat perempuan dalam kebersihan lingkungan terutama kebersihan gang. Kesadaran ini terbentuk karena di desa ini pernah terjangkit penyakit demam berdarah. Dari pengalaman tersebut maka seluruh anggota PKK di semua banjar di site ini mengadakan lomba kebersihan

gang yang dinilai setiap minggu. Penilaian dilaksanakan oleh anggota PKK setempat yang telah menjadi kader dalam pemberantasan demam berdarah. Di masing-masing banjar ada 5 orang kader perempuan yang setiap minggu akan mengadakan pemeriksaan jentik di tiap-tiap gang. Kalau ada gang yang selokannya masih ada jentik nyamuknya maka kader ini akan memberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat di gang tersebut untuk lebih meningkatkan kebersihan gang di sekitarnya. Kegiatan kebersihan gang ini merupakan kegiatan kelompok PKK yang dilaksanakan secara mandiri di bawah pembinaan Puskesmas setempat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan sekitar secara kolektif guna kepentingan bersama secara mandiri.

Di site B sebagian besar masyarakatnya sebagai petani, dan perempuan di desa ini sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Peranan perempuan dalam kegiatan-kegiatan pertanian mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan bahkan sampai pada kegiatan pasca panen. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan tentang cara penanggulangan hama dan penyakit tanaman, perempuan justru tidak dilibatkan. Padahal perempuan perlu memiliki akses untuk ikut serta memahami bagaimana cara penanggulangan hama penyakit tanaman tersebut, karena pada kenyataannya mereka terlibat pada kegiatan pertanian. Selain berperan dalam kegiatan-kegiatan pertanian, perempuan di desa ini sebenarnya pernah membentuk beberapa kelompok ekonomi produktif perempuan seperti kelompok pembuat keripik ceke ayam, kelompok pembuat keripik nangka dan kelompok peternak babi. Kelompok-kelompok ini sempat berkembang pesat karena adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Dinas Perindustrian. Tetapi pada saat pembinaan terhenti dan semakin banyaknya jenis

usaha yang sama sehingga saingan produk makin banyak maka kelompok-kelompok ini saat ini dalam keadaan vakum (tidak berproduksi). Keadaan ini menurut Ibu Darni (sekretaris PKK di site B) disebabkan selain pemasaran yang mulai sulit karena semakin banyak saingan, juga karena anggota kelompok tidak dapat membagi waktu antara kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi sehingga kegiatan-kegiatan kelompok sering terbengkalai. Lebih lanjut dikatakan bahwa masih ada beberapa mesin dan alat-alat bantuan pemerintah yang tidak dimanfaatkan, karena kegiatan kelompok tidak berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan di desa ini untuk membina kelompok dan bersinergi dengan sesama masih sangat rendah, sehingga anggota kelompok masih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kolektif, kelompok perempuan masih juga harus berkoordinasi dengan kelompok pria terutama dengan pemimpin adat.

Di Desa Legian maupun di Desa Peninjoan, interval komunikasi perempuan cukup tinggi (sering), karena dari hasil wawancara mendalam ternyata hubungan antara sesama warga perempuan cukup erat, hal ini dapat dilihat dari seringnya warga perempuan melakukan hubungan, baik dengan kerabat, teman maupun warga lainnya. Hubungan mereka itu dilakukan baik melalui kunjungan langsung (silaturahmi), lewat telepon maupun surat menyurat.

## Diskusi

Di antara site A dan site B komunitas perempuan dalam mengekspresikan kemampuannya untuk mencapai tujuan bersama agak sedikit berbeda. Hal ini terlihat dari keberhasilan komunitas perempuan di site A untuk memotivasi anggota dalam melaksanakan kegiatan kolektif yang berkelanjutan (salah satunya adalah keberhasilan dalam pemberantasan demam berdarah). Sedangkan komunitas pe-

empuan di site B lebih banyak melaksanakan kegiatan secara sendiri-sendiri (hal ini terbukti dengan gagalnya beberapa kelompok untuk berkembang). Di samping itu sumber daya manusia sebagai salah satu elemen modal sosial di site B masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari distribusi pendidikan sebagian besar responden hanya tamat sekolah menengah atas, dan sebagian besar bekerja sebagai petani. Awan (2005) menyatakan bahwa pendapatan petani yang tidak seberapa besar menyebabkan kehiupan petani masih jauh dari layak, sehingga kesejahteraan masyarakat di site B tergolong masih rendah. Akibat rendahnya kesejahteraan, maka perempuan masih disibukkan oleh urusan pribadi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga hampir tidak ada waktu untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Collier (1998), bahwa konsep modal sosial menekankan adanya hubungan yang erat antara modal sosial dan sumber daya manusia (*human capital*) dan bahwa modal sosial dapat mengatasi permasalahan oportunistik, sehingga memudahkan aksi kolektif. Komunitas perempuan di site ini lebih memilih melaksanakan aktivitas mengikuti kebijakan dari pemerintah maupun pemimpin desa, sehingga menyebabkan seolah-olah komunitas perempuan di site ini pasif. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya komunitas perempuan di site B dalam membina kegiatan kolektif karena kemampuan masing-masing individu dalam memahami kepentingan bersama untuk tujuan yang sama masih sangat rendah. Sesuai pendapat (Adler dan Woo Kwon, 1999) bahwa modal sosial adalah barang publik di mana sifatnya adalah menyebabkan setiap individu cenderung melalaikan kewajiban dalam memelihara keberlangsungan kelompok dan sebaliknya mempercayakan pada anggota yang lain untuk jaminan pemeliharaannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman perempuan di site B terhadap pentingnya modal sosial, jejaring kerja untuk tuju-



an bersama. Oleh karena itu komunitas perempuan di site B sangat memerlukan usaha untuk memberdayakan kelompok perempuan dalam memahami kepentingan bersama, masalah bersama dan meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. Di samping itu perlu dilakukan penyadaran bagi kelompok perempuan bahwa mereka selain memiliki kewajiban juga memiliki hak untuk maju bersama dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryani (2006) bahwa perlu ada penyadaran kepada perempuan Bali agar mempunyai wawasan yang luas untuk lebih meningkatkan kemampuan orang Bali secara keseluruhan baik dalam menjaga identitas budaya maupun dalam menjaga keharmonisan dan kemajuan keluarga serta masyarakat

Komunitas perempuan di site A kelihatan lebih ekspresif dan lebih memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan-kegiatan kolektif secara mandiri. Hal ini terlihat dari keberhasilan kelompok PKK di site A untuk membasmi jentik nyamuk dengan melaksanakan kebersihan gang secara rutin, sehingga hal ini merupakan modal untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam pemberdayaan komunitas termasuk dalam rangka pengelolaan ketahanan hayati. Di samping itu jaringan kerja antar anggota masyarakat terlihat lebih rekat walaupun komunitas di site A hampir sebagian berasal dari luar site A (merupakan penduduk pendatang) (BPS, 2006). Ini mungkin merupakan dampak dari struktur kepemimpinan di site A di mana ada slogan "Legian Bersatu" yang menjadi acuan bagi warga Legian untuk bergerak dan beraktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Adanya kesenjangan antara perempuan dan pria dalam pengambilan keputusan di ke dua desa penelitian memerlukan usaha-usaha penguatan organisasi (kelembagaan) perempuan. Dengan terbentuknya organisasi (kelembagaan) perempuan yang kokoh, solid dan terintegrasi maka diharapkan akan mampu memperjuangkan hak-hak perempuan dalam persama-

an untuk berkembang dan maju dalam segala bidang termasuk di bidang pertanian dan ketahanan hayati. Hal ini sesuai dengan pendapat Flora (2007) bahwa modal sosial merupakan hubungan antara orang dan organisasi yang mencakup hubungan saling percaya, bergerak secara kolektif dan memiliki rasa untuk membagi masa depan dan bekerja bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan bersama. Apabila hal ini tidak berjalan dengan baik maka pencapaian ekosistem yang sehat dan ekonomi yang baik tidak akan terjadi. Tanpa modal sosial, kohesi dalam komunitas berkurang sehingga tidak dapat mengorganisasi diri dalam pemeliharaan mutu kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihoods*) (Beeton, 2006). Demikian juga dengan modal sosial menurut World Bank (1998) dari perspektif *institutional view* bahwa jaringan kerja komunitas dan masyarakat merupakan hasil dari keadaan politik, hukum dan kelembagaan.

Dari data diperoleh bahwa kelompok perempuan baik di site A maupun site B cukup sering berkomunikasi baik antar keluarga, teman dan kolega bisnis. Hal ini sebenarnya merupakan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan transfer informasi, di mana informasi merupakan modal untuk membangun jejaring yang mungkin nantinya dapat menguatkan ikatan antar anggota komunitas dalam mengenali, memahami, dan mengatasi masalah bersama. Tetapi dari topik yang dibicarakan ternyata belum banyak menyentuh kepentingan yang mendasar untuk mendorong kegiatan kolektif untuk tujuan bersama. Perempuan berkomunikasi masih hanya sekedar urusan keluarga, adat, dan spiritual, sehingga modal ini mungkin dapat diberdayakan agar komunikasi mengarah ke hal-hal yang bersifat menunjang kepentingan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Hasil penelitian Rodda (1993) menemukan bahwa perempuan di hutan *mangrove* Papua telah mampu mempengaruhi lingkungan baik sebagai *consumers* (memanfaatkan lingkungan untuk

kebutuhan sehari-hari), *educators* (mampu mentransfer pengetahuan) dan sebagai *communicators* (mampu menularkan dan mengkomunikasikan hal-hal yang diketahui sehingga bermanfaat bagi orang lain). Dari keberhasilan ini perempuan di daerah tersebut telah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan menularkan pengetahuannya dalam memanfaatkan hasil hutan pada anak dan tetangga di sekitarnya.

## Perpaduan

Suryani (2006) menyatakan bahwa perempuan sebenarnya jangan terus merasa memiliki perasaan tidak seimbang. Menurut dia, perempuan harus berbuat dan tunjukkan ke masyarakat bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Dengan memperlihatkan kemampuan berhasil dalam jenjang pendidikan, dalam rumah tangga maupun dalam aktivitas di masyarakat, maka secara otomatis masyarakat terutama kaum pria akan berpikir bahwa bukan dia seorang perempuan, tetapi dia itu adalah orang yang mampu.

Struktur kepemimpinan perempuan yaitu PKK merupakan sebuah wadah untuk memulai pemberdayaan perempuan di tingkat Desa maupun Banjar agar meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban untuk mengenali, memutuskan, mengatasi masalah yang dihadapi bersama. Modal sosial yang telah dimiliki oleh perempuan seperti kemampuan melakukan kegiatan kolektif secara mandiri, sering melakukan komunikasi dan keberhasilan perempuan dalam pembentukan kelompok-kelompok untuk mengakomodasi kepentingan bersama perlu ditingkatkan dan difasilitasi agar mampu berkembang menjadi sebuah modal sosial dalam rangka mengelola ketahanan hayati.

Perlu adanya pengakuan bahwa peranan perempuan dalam kegiatan kolektif baik di Desa Adat maupun Desa Dinas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan tersebut, karena perempuan sudah memiliki

peran-peran khusus yang biasanya tidak mungkin dikerjakan oleh kelompok pria. Jadi kerjasama antara kelompok perempuan dan kelompok pria perlu dipertahankan dalam melaksanakan keanggotaan kolektif untuk kepentingan bersama. Problema ketimpangan yang terjadi dalam struktur budaya masyarakat terjadi karena konstruksi sosial yang telah dibangun secara berabad-abad lamanya, sehingga telah menjadi hukum yang tidak tertulis dan dipegang sebagai warisan budaya yang cenderung dipertahankan. Jika ketimpangan yang telah membudaya ini dapat diarahkan ke hal-hal yang positif seperti memberdayakan kekuatan modal sosial dari kaum perempuan maka bukan tidak mungkin dapat digunakan untuk memberdayakan kaum perempuan di masyarakat untuk lebih tanggap terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar dan dapat secara bersama-sama mengatasi masalah-masalah yang dihadapi termasuk masalah ketahanan hayati.

## Kesimpulan, Ringkasan dan Implikasi

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa sudah ada kelembagaan perempuan yang dapat mengakomodasi kepentingan perempuan baik di tingkat desa, maupun banjar yaitu PKK, walaupun peran perempuan pada kelembagaan ini masih seperti bayangan dari kelembagaan kelompok pria. Hal ini menyebabkan perempuan belum memiliki kewenangan penuh untuk pengambilan keputusan. Pada kelembagaan yang bersifat koordinasi seperti BAMUS di site A dan BPD di site B, elemen perempuan belum terwakili, sehingga seolah-olah kepentingan perempuan belum terakomodasi.

Perempuan sebenarnya telah memiliki peranan yang cukup besar pada kegiatan-kegiatan kolektif, tetapi memang masih selalu dibayangi oleh kelompok pria. Demikian juga dengan pengalaman mengorganisasi kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan sudah terlihat tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dan profesional.



Kemampuan dan kemauan berkomunikasi kelompok perempuan pun cukup tinggi, hal ini sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan dengan baik maka perempuan mampu mempengaruhi lingkungan di sekitarnya untuk melaksanakan kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama. Kalau perempuan mau maka perempuan dapat lebih memberdayakan kekuatan modal sosial yaitu dengan menyeimbangkan tujuh aspek modal sosial (Flora, 2007) yang dimiliki dengan lebih meningkatkan partisipasi dan aksi nyata pada tingkat komunitas dalam rangka mengenali dan mengatasi masalah yang dihadapi baik dalam bidang sosial, budaya, spiritual, pertanian dan mungkin juga dalam mengelola ketahanan hayati.

### Daftar Pustaka

- Adler, PS & Woo Kwon, S., 1999. *Social Capital: The Good, The Bad and Ugly*. Expanded paper from the 1999 Academy of management meeting in Chicago. Los Angeles: Marshall School of Business, University of Southern California.
- Ardhana, 1994. *Bali Dalam Kilasan Sejarah dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Bali Post. Bali, Indonesia
- Australian Bureau of Statistics (ABS). 2002. *Social Capital and Social Wellbeing Discussion Paper*. (Online) <http://www.oecd.org/dataoecd/2/30/2360806.pdf>, diakses 5 Maret 2007
- Awan, M.A., 2005. *Perbedaan Gender di Bidang Pertanian*. [www.pikiran-rakyat.com/2005](http://www.pikiran-rakyat.com/2005).
- Badan Pusat Statistik [BPS], 2006. *Kabupaten Badung*. Kecamatan Kuta dalam Angka.
- Beeton, R.S.J., 2006. *Society's forms of capital: Framework for renewing our thinking*, paper prepared for the 2006 Australian State of the Environment Committee, Department of the Environment and Heritage, Canberra, (Online), <http://www.deh.gov.au/soe/2006/emerging/capital/index.html>, diakses 24 Mei 2007
- Collier, P., 1998. *Social Capital and Poverty*. World Bank SCI Working paper No. 4 November ([www.iris.umd.edu/adass/proj/soccap.asp](http://www.iris.umd.edu/adass/proj/soccap.asp))
- Coleman, J.S., 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge M.A. Belknap.
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitative inquiry and research design choosing among five traditions*. Sage Publications, California, USA.
- Dasgupta, P & Serageldin, 2000. *Social Capital: A Multi Faceted Perspective*. World Bank, Washington, DC.
- Falk, I., 2007. *Communities Learning to Secure their Futures*. Makalah disampaikan pada International Summit Community Based of Biosecurity at Sanur, Bali. this volume
- Flora, C.B., 2007. *Community Capitals Framework*. Makalah disampaikan pada International Summit Community Based of Biosecurity at Sanur, Bali. this volume
- \_\_\_\_\_ & Kroma, M.M., 1998. *Gender and Sustainability in Agriculture and Rural Development*. In G.E.D Souza and T.G. Gebermedhin (eds.) *Sustainability in Agricultural and Rural Development*, pp. 103-116, Brookfield, VT: Ashgate Publishing Company.
- Fonjong, NL & Athanasia, M.F., 2007. *The Fortune and Misfortune of Women Rice Producers in Ndop, Cameroon, and Implications for Gender Roles*. Department of Gender Studies FSMS, University of BUiea, Cameroon.
- Fontana, A & Frey, J.H., 2000. *The interview: From neutral stance to political involvement*. In Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln (eds.). *The Stage Handbook of Qualitative Research* (3rd), Sage Publications CA, USA.
- Indrayoga, O.K. 2006. *Apa Peranan Perempuan Bali?* Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Nasional Upaya Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pengembangan Wirausaha. Pusat Inovasi LIPI. (online). <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/27/tama/28042.htm>, diakses 15 April 2007
- Grotaert, C., 1998. *Social Capital: the Missing Link*. The World Bank. (online). <http://www.the.worldbank.org>. diakses 24 Mei 2007.
- Hanson, D, Muller, R & Durheim, D., 2006. *Documenting the development of social capital in a community safety promotion coalition using social network analysis*. (online), <http://www.engagingcommunities2005.org/abstracts/hanson-Dale-final.pdf>, diakses 3 Maret 2007.

- Maluccio A, Haddad JL & May J., 2003. Social capital and gender in South Africa, 1993-98. In A. Quisumbing (ed) *Household Decisions, Gender and Development: A Synthesis of Recent Research*. Washington D.C.: International Food Policy Research Institute.
- Meinzen-Dick, R. & Zwartveen, 2003. Gender participation in water management: Issues from water users associations in South Asia. In *Household Decisions, Gender and Development: A synthesis of Recent Research*. More info?
- Nakatani, A., 1997. Private of Public?: Defining Female Roles in the Balinese Ritual Domain. *South East Asian Studies* 34, No.4. page nos
- Narayan, D., 2000. Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. *The World Bank Research Observer* 15, p.225-249.
- \_\_\_\_\_ & Pritchett, L, 1999. Cents and sociability: Household income and social capital in rural Tanzania. *Economic Development and Cultural Change* 47, 871-986.
- Pendit, N.S., 2002. *Bhagavadgita*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 342 pp.
- Pietra, W 2006, *Masyarakat kita punya apa?* Makalah disampaikan pada seminar tentang Modal Sosial di Jakarta. 7 hal.
- Putnam, R.D., 2000. *Bowling Alone - the Collapse and Revival of American Community*, Simon & Scuster, New York.
- Rodda, 1993. *Women and the Environment*. Zed Books, London.
- Silverman, S., 1998. *Qualitative Research. Theory, Methods and Practice*. Sage Publications, Ltd, London, UK.
- Sudarsana, 2005. *Ajaran Agama Hindu Upadesa*. Yayasan Dharma Acarya Mandara Sastra. 45 hal.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Kesetaraan Gender Diakui Dalam Weda*. (on line) <http://www.balipost.co.id/balipost-cetak/2006/6/1/bdi.htm>. diakses 15 April 2007
- Suryani, L.K., 2006. *Apa Peranan Perempuan Bali?* Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Nasional Upaya Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pengembangan Wirausaha. Pusat Inovasi LIPI (online).<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/27/utama/28042.htm>, diakses 15 April 2007.
- Vipriyanthi, N.U. 2007. *Analisis Keterkaitan Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi Wilayah*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
- Walhi, 2007. *Penuhi Hak Asasi Perempuan di dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan*. <http://www.or.id/kampanye/psda>. Di akses 16 Maret 2007.
- Woolcock, M, & Narayan D., 2000. Social Capital: Implications for Development Theory, research, and Policy. *The World Bank Research Observer*, 15, 225-49.
- World Bank, 1998. *The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital*. Overview and Program Description. Social Development Family. Environmentally and Socially Sustainable Development Network.